

Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Ida Ayu Sinta Mahadewi¹

I Gusti Ayu Nyoman Budiasih²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: dayusintaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan menguji pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan asing pada pengungkapan CSR. Pengomunikasian informasi CSR dapat dilakukan dengan pengungkapan CSR. Penelitian dilakukan pada perusahaan jasa sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian sejumlah 67 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan tiga kriteria dan selanjutnya didapatkan 32 sampel. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR, sedangkan kepemilikan asing berpengaruh negatif pada pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini secara teoretis dapat mengonfirmasi teori keagenan dan tata kelola perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*; Kepemilikan Institusional; Kepemilikan Asing

Institutional Ownership, Foreign Ownership and Disclosure of Corporate Social Responsibility

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of institutional ownership and foreign ownership on CSR disclosure. Communicating CSR information can be done by disclosing CSR. The research was conducted at service companies in the property, real estate and building construction sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The research population is 67 companies. Determining the number of samples using purposive sampling technique with three criteria and then obtained 32 samples. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that institutional ownership has a positive effect on CSR disclosure, while foreign ownership has a negative effect on CSR disclosure. The results of this study can theoretically confirm agency theory and corporate governance.

Keywords: *Corporate Social Responsibility*; Institutional Ownership; Foreign Ownership

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 3
Denpasar, 26 Maret 2023
Hal. 602-618

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i03.p02

PENGUTIPAN:

Mahadewi, I. A. S., & Budiasih, I. G. A. N. (2023). Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(3), 602-618

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
28 Oktober 2021
Artikel Diterima:
25 Desember 2021

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial perusahaan telah menerima perhatian besar di antara komunitas bisnis dunia dalam dekade terakhir, dan Indonesia tidak terkecuali (Hermawan & Gunardi, 2019). Tanggung jawab sosial perusahaan timbul sebagai akibat dari adanya keberadaan perusahaan-perusahaan yang aktivitasnya menimbulkan banyak dampak negatif bagi kehidupan. Di Indonesia tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan yang disebutkan pada UU RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. CSR secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial dan lingkungan sekitar tempat perusahaan itu berada (Santoso, 2016).

Perhatian yang besar dari masyarakat terhadap CSR mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dengan maksud agar keberadaan perusahaan dapat dilihat dengan pandangan yang baik. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak akan diketahui masyarakat luas apabila perusahaan tidak mengomunikasikan informasi terkait CSR yang telah dilakukan. Pengomunikasian informasi CSR perusahaan dapat terlaksana apabila perusahaan melakukan pengungkapan. Pengungkapan merupakan bentuk keterbukaan perusahaan dalam menyampaikan informasi perusahaan. Informasi yang disampaikan harus memberikan penjelasan yang cukup dan bisa mewakili keadaan yang sebenarnya dalam perusahaan. Pengungkapan yang ada pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu informasi berbentuk laporan yang ditujukan kepada *stakeholder* dengan tujuan agar terwujudnya transparansi dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan khususnya aktivitas lingkungan (Nurhandika & Hamzah, 2019). Menurut Chariri & Ghazali (2007:393), pengungkapan informasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Di Indonesia pengungkapan CSR merupakan pengungkapan yang bersifat sukarela. Berdasarkan UU RI No. 40 Tahun 2007 pasal 66 ayat 2, pengungkapan pertanggungjawaban sosial wajib dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Selain dari laporan tahunan, pengungkapan CSR dapat dimuat dalam laporan keberlanjutan (*sustainability report*) perusahaan. Luas pengungkapan CSR dapat diketahui melalui indeks pengungkapan CSR atau *Corporate Social Responsibility Index* (CSRDI).

Berdasarkan penelitian Hitipeuw *et al.* (2020) dan Sajekti & Priyadi (2019) rata-rata luas pengungkapan CSR pada perusahaan pendukung jasa konstruksi seperti perusahaan properti dan *real estate* masih relatif rendah, sementara itu saat ini perusahaan pendukung jasa konstruksi berpotensi mengalami perkembangan bisnis yang baik karena pemerintah berfokus salah satunya pada peningkatan pembangunan infrastruktur. Ulya (2019) menyebutkan bahwa pemerintah

menaikkan anggaran infrastruktur sebesar 4,9 persen dari 399,7 triliun rupiah menjadi 419,2 triliun rupiah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020 (money.kompas.com). Menurut Bardan (2020), Presiden Joko Widodo memastikan akan terus menggenjot penyelesaian infrastruktur meskipun sedang menghadapi pandemi Covid-19 (nasional.kontan.co.id). Pembangunan infrastruktur juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) (2020) melakukan perencanaan dan program pembangunan Infrastruktur ke depan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dari negara lain serta pemenuhan target pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR 2020-2024 (bpiw.pu.go.id). Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (2018) menyatakan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur berkontribusi besar dalam menciptakan pasar jasa konstruksi di Indonesia (binakonstruksi.pu.go.id). Gencarnya pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini memungkinkan perusahaan pendukung jasa konstruksi untuk berkembang, namun bisnis konstruksi selain memberikan kontribusi yang baik bagi negara juga dapat berpotensi memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Kegiatan konstruksi yang berdampak negatif bagi lingkungan dapat diimbangi dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, namun tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan pendukung jasa konstruksi saat ini masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan keterbukaan informasi atau transparansi informasi perusahaan pendukung jasa konstruksi yang rendah pula, dimana transparansi berkaitan dengan tata kelola perusahaan.

Menurut Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih (*principal*) yang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa, dimana wewenang pengambilan keputusan didelegasikan kepada *agent*. Salah satu asumsi utama dari teori agensi bahwa tujuan prinsipal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik kepentingan, dimana prinsipal dan agen bertindak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Teori agensi berusaha untuk mengurangi konflik kepentingan antara *stakeholders* dan manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham (Yurdila J *et al.*, 2019). Konflik kepentingan terjadi karena adanya asimetri informasi di antara dua pihak yaitu agen dan prinsipal (Sulistyo & Hermanto, 2019). Asimetri informasi terjadi apabila salah satu pihak (agen) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya (prinsipal). Asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham). Tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen akibat asimetri informasi dapat dibatasi dengan sebuah mekanisme pengendalian tata kelola perusahaan atau corporate governance (Fitranita *et al.*, 2017).

Menurut *Cadbury Committee* (1992) tata kelola perusahaan adalah sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Perusahaan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG. Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), terdapat 4 prinsip tata kelola perusahaan, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Menurut OECD, prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Keterbukaan dilakukan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan perusahaan sehingga nilai pemegang saham dapat ditingkatkan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 4, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sebagai organ utama perusahaan, pemegang saham bertanggung jawab atas pengambilan keputusan sehingga transparansi perusahaan menjadi penting bagi pemegang saham. Keterbukaan informasi perusahaan memudahkan pemegang saham dalam membuat keputusan yang lebih baik yang akan menghasilkan laba atas investasi yang lebih baik. Berdasarkan teori keagenan, pengungkapan sukarela pada CSR merupakan salah satu cara untuk mengurangi masalah keagenan (Gavana *et al.*, 2017). Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR maka akan meningkatkan transparansi sehingga menurunkan asimetri informasi (Crystalita & Juniarti, 2017).

Komposisi pemegang saham dibedakan menjadi kepemilikan oleh pihak dalam (*insider ownership*) dan kepemilikan oleh pihak luar perusahaan (*outsider ownership*). *Outsider ownership* terdiri dari kepemilikan institusi (domestik dan asing), pemerintah, dan kepemilikan masyarakat (individu domestik dan asing). Sedangkan *insider ownership* terdiri dari pihak agen seperti dewan direksi dan pihak manajer. (Aldin (2020) menyatakan bahwa komposisi kepemilikan saham di BEI per Oktober 2020 terdiri dari kepemilikan oleh pemegang saham ritel sebesar 12,2%, pemegang saham institusi domestik sebesar 39% saham dan institusi asing sebesar 48,8% saham (katadata.co.id). Data tersebut menunjukkan bahwa pemegang saham institusi domestik dan institusi asing memiliki saham yang cukup besar di Indonesia. Kepemilikan saham yang besar memungkinkan terdapat pengaruh yang besar pula dari pemegang saham institusi domestik dan pemegang saham institusi asing terhadap pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi. Pernyataan paling relevan tentang investor institusional yang dapat menunjukkan fitur umum mereka adalah bahwa mereka secara fisik bukan manusia (Malik *et al.*, 2017), namun dapat berbentuk seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya (Edison, 2017). Fitriana (2019) menyatakan bahwa pemegang saham institusi dapat menjadi alat yang efektif untuk

melakukan *monitoring*. Investor institusional memiliki *power* dan *experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip *corporate governance* untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Pemegang saham institusional dapat menggunakan kekuatan suara yang signifikan dan memiliki keunggulan informasi dibandingkan pemegang saham minoritas lainnya (Won-Yong *et al.*, 2015). Kepemilikan saham yang besar oleh investor institusional menyebabkan investor institusional memiliki wewenang dalam pengendalian perusahaan sehingga dapat mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap tata kelola perusahaan. Pemegang saham institusional dengan kekuatan pengawasannya dapat meminimalisir adanya tindakan penyimpangan atau oportunistis manajemen akibat asimetri informasi yang dapat merugikan perusahaan. Pemegang saham institusional dapat menuntut manajemen untuk melakukan pengungkapan CSR sebagai bentuk transparansi manajemen perusahaan, sehingga asimetri informasi juga dapat diminimalisir dan konflik kepentingan dapat diatasi.

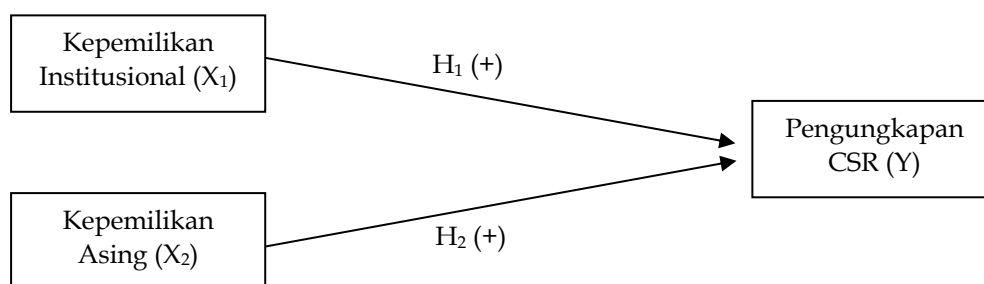
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 penanam modal asing / kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Kepemilikan asing dapat memengaruhi CSR perusahaan sebab kepemilikan asing dipercaya dalam membuat keputusan yang lebih berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan selain ekonomi (Zulaecha & Murtanto, 2019). Pihak asing dianggap lebih memperhatikan pengungkapan tanggung jawab perusahaan tanggung jawab sosial perusahaan. Manurung & Muid (2015) menyatakan apabila perusahaan memiliki kontrak dengan *foreign stakeholders* baik dalam *ownership* dan *trade*, maka perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Harvidiyan & Dianawati (2020) keterbatasan jarak geografis dan hambatan bahasa membuat pemegang saham asing menghadapi risiko asimetri yang tinggi dalam informasi yang mereka terima yang menyebabkan pemegang saham asing menginginkan kualitas informasi yang lebih tinggi terkait aktivitas perusahaan. Kualitas informasi yang tinggi dapat didukung oleh tata kelola perusahaan dengan meningkatkan transparansi, dimana pengungkapan CSR merupakan salah satu bentuk transparansi perusahaan. Maka dari itu semakin tinggi tingkat kepemilikan asing pada perusahaan, maka upaya pengungkapan *corporate social responsibility* akan cenderung semakin meningkat (Yani & Suputra, 2020).

Putri & Gunawan (2019) dalam penelitian sebelumnya telah menganalisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Struktur Kepemilikan pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. Penelitian Putri & Gunawan (2019) memperoleh hasil bahwa struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR, sedangkan struktur kepemilikan asing berpengaruh positif pada pengungkapan CSR sebab kepemilikan asing di Indonesia turut peduli terhadap isu-isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan sebagai isu kritis yang secara ekstensif harus diungkapkan dalam laporan tahunan

perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini menambahkan perusahaan sub-sektor konstruksi bangunan sebagai lokasi penelitian, selain itu penelitian ini juga memiliki kebaruan pada periode penelitian, yaitu menggunakan periode tahun 2017-2019.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian tentang pengungkapan CSR telah banyak dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur dan pertambangan, namun masih sedikit penelitian terkait dilakukan pada perusahaan sektor konstruksi yang mana saat ini sektor pendukung jasa konstruksi berpotensi memiliki perkembangan yang baik dan dalam kegiatannya berpotensi memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Tingkat pengungkapan CSR yang relatif rendah pada perusahaan pendukung jasa konstruksi, serta masih sedikitnya penelitian mengenai pengungkapan CSR pada perusahaan pendukung jasa konstruksi membuat peneliti mencoba melakukan penelitian tentang Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing pada Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Studi pada Perusahaan Jasa Sektor Properti, *Real estate*, dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Periode 2017- 2019).

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, kajian teoretis, dan tinjauan penelitian terdahulu dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan teori keagenan, salah satu penyebab terjadinya konflik kepentingan adalah adanya asimetri informasi (*information asymmetry*), dimana penyimpangan perilaku dan keputusan manajemen akibat asimetri informasi dapat diatasi dengan sebuah mekanisme pengendalian atau tata kelola yang baik dalam perusahaan. Pengungkapan CSR merupakan salah satu bentuk transparansi informasi perusahaan yang dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Fitriana (2019) menyatakan bahwa pemegang saham institusi dapat menjadi alat yang efektif untuk melakukan pengawasan, dimana investor institusional memiliki *power* dan *experience* untuk bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan untuk melindungi hak dan kepentingan seluruh pemegang saham, sehingga mereka menuntut perusahaan untuk melakukan komunikasi secara transparan. Pemegang saham institusional menanamkan saham yang besar di perusahaan, oleh karena itu pemegang saham institusional menempati posisi yang kuat dalam hal pengawasan kinerja tata kelola perusahaan. Usaha pengawasan yang kuat dari pemegang saham institusional dapat mendorong dalam meningkatkan

pengungkapan CSR. Penelitian yang dilakukan oleh Edison (2017), Nurleni *et al.* (2018), Shahab & Ye (2018), Singal & Putra (2019), Suhartono *et al.* (2018), Visessa & Efendi (2019), serta Yani & Suputra (2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kepemilikan institusional pada pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₁: Tingkat kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

Berdasarkan teori keagenan penyimpangan perilaku dan keputusan manajemen akibat asimetri informasi dapat diatasi dengan sebuah mekanisme pengendalian atau tata kelola yang baik dalam perusahaan. Pengungkapan CSR bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam tata kelola perusahaan khususnya pada aktivitas lingkungan. Salah satu organ perusahaan yang peduli akan isu-isu sosial dan lingkungan adalah pemegang saham asing. Putri & Gunawan (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing di Indonesia turut peduli terhadap isu-isu sosial misalnya hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan lingkungan sebagai isu kritis yang secara ekstensif harus diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Kepedulian pemegang saham asing terhadap isu-isu sosial dan lingkungan akan memicu dorongan bagi perusahaan untuk mengungkapkan kegiatan CSR sebagai bentuk transparansi perusahaan atas aktivitas sosial dan lingkungan. Pemegang saham asing juga cenderung memperhatikan prospek jangka panjang perusahaan. Pengungkapan CSR dapat menjamin prospek jangka panjang perusahaan karena pengungkapan CSR merupakan salah satu bentuk transparansi perusahaan yang dapat membentuk *image* yang baik di mata masyarakat, sehingga masyarakat senantiasa akan mendukung kegiatan perusahaan. Harvidiyan & Dianawati (2020), Naqvi (2019), Nurhandika & Hamzah (2019), Putri & Gunawan (2019), Rustam *et al.* (2019), serta Yani & Suputra (2020) menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Berdasarkan penjelasan ini, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

H₂: Tingkat kepemilikan asing berpengaruh positif pada pengungkapan *corporate social responsibility*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif, yang digunakan untuk menunjukkan pengaruh dari variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan asing pada pengungkapan CSR. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan metode analisis isi atau *content analysis* berbentuk kuantitatif. Metode dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dari dokumen, dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan. Metode analisis isi atau *content analysis* berbentuk kuantitatif digunakan dalam pengumpulan data pengungkapan CSR. Metode analisis isi kuantitatif dilakukan dengan pengukuran data dari penyusunan kategorisasi, dimana kategori yang digunakan dalam penelitian terdapat pada GRI G4. Analisis isi dilakukan terhadap laporan tahunan perusahaan. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada

perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019. Perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan dipilih karena saat ini sektor pendukung jasa konstruksi berpotensi memiliki perkembangan yang baik dan dalam kegiatannya berdampak besar bagi lingkungan. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR (Y), kepemilikan institusional (X_1), dan kepemilikan asing (X_2).

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Data pengungkapan CSR diperoleh dengan metode analisis konten atau *content analysis*. Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan menggunakan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) dimana pengukuran yang dalam penelitian ini menggunakan kriteria dari pedoman *Global Report Initiative* (GRI) generasi keempat atau GRI-G4 yang memiliki 91 *item* pengungkapan. Pengukuran dilakukan dengan memberi skor 1 terhadap *item* yang diungkapkan sesuai dengan kategori dan memberi skor 0 terhadap *item* yang tidak diungkapkan sesuai dengan kategori GRI. Pengungkapan CSR diukur menggunakan indikator GRI G4. Pengukuran indeks pengungkapan CSR pada penelitian ini menggunakan rumus yang digunakan Sayekti & Wondabio (2007), yaitu sebagai berikut.

$$CSRDI_j = \frac{\sum X_{ij}}{n_j} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

CSRDI_j = *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan j

$\sum X_{ij}$ = Jumlah *item* yang diungkapkan oleh perusahaan (1 = *item* i diungkapkan, 0 = *item* i tidak diungkapkan)

N_j = 91 (skor maksimal) dengan demikian, $0 < CSRDI_j < 1$

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi (badan) seperti yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan dan lain sebagainya. Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Menurut Sartono (2010:487) rumus perhitungan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut.

$$KI_{it} = \frac{JKI_{it}}{JSB_{it}} \times 100 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

KI_{it} = Kepemilikan institusional perusahaan i pada tahun t

JKI_{it} = Jumlah kepemilikan oleh pihak institusional perusahaan i pada tahun t

JSB_{it} = Jumlah saham yang beredar perusahaan i pada tahun t

Menurut UU No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 penanam modal asing/kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah

Republik Indonesia. Kepemilikan asing yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu saham yang dimiliki oleh kepemilikan asing dalam bentuk institusi asing. Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase kepemilikan saham asing yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2017-2019. Kepemilikan asing merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham asing terhadap total jumlah saham yang beredar (Farooque *et al.*, 2007). Berikut adalah rumus perhitungan kepemilikan asing.

$$KA_{it} = \frac{JKA_{it}}{JSB_{it}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

KA_{it} = Kepemilikan asing perusahaan i pada tahun t

JKA_{it} = Jumlah kepemilikan oleh pemegang saham asing perusahaan i pada tahun t

JSB_{it} = Jumlah saham yang beredar perusahaan i pada tahun t

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019. Sampel penelitian ini diambil dari populasi tersebut berdasarkan metode *non-probability* menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti dalam menentukan sampel penelitian sebagai berikut: 1) Perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama 3 tahun berturut-turut dalam periode 2017-2019. 2) Perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang memiliki kelengkapan data informasi mengenai pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing selama periode 2017-2019. Berdasarkan kriteria tersebut, didapat total sampel sebanyak 32 perusahaan, untuk total observasian periode 2017-2019 adalah sejumlah 96 observasian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan tahunan perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019 dengan mengunduh data tersebut melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id.

Teknik analisis regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 KI + \beta_2 KA + \dots\dots\dots (4)$$

Keterangan:

Y = Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien Regresi

KI = Kepemilikan Institusional

KA = Kepemilikan Asing

ϵ = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan kriteria yang telah ditentukan peneliti sebelumnya. Hasil seleksi sampel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Seleksi Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Populasi perusahaan jasa sektor properti, <i>real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI selama 3 tahun berturut-turut dalam periode 2017-2019	67
2	Perusahaan jasa sektor properti, <i>real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang tidak menerbitkan laporan tahunan secara lengkap selama 3 tahun berturut-turut selama periode 2017-2019	(8)
3	Perusahaan jasa sektor properti, <i>real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang tidak memiliki kelengkapan data informasi mengenai pengungkapan CSR, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing selama periode 2017-2019	(27)
	Jumlah Perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian	32
	Jumlah data observasi (pengamatan 3 tahun)	96

Sumber: Data Penelitian, 2021

Statistik deskriptif menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian, yaitu nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Hasil uji statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

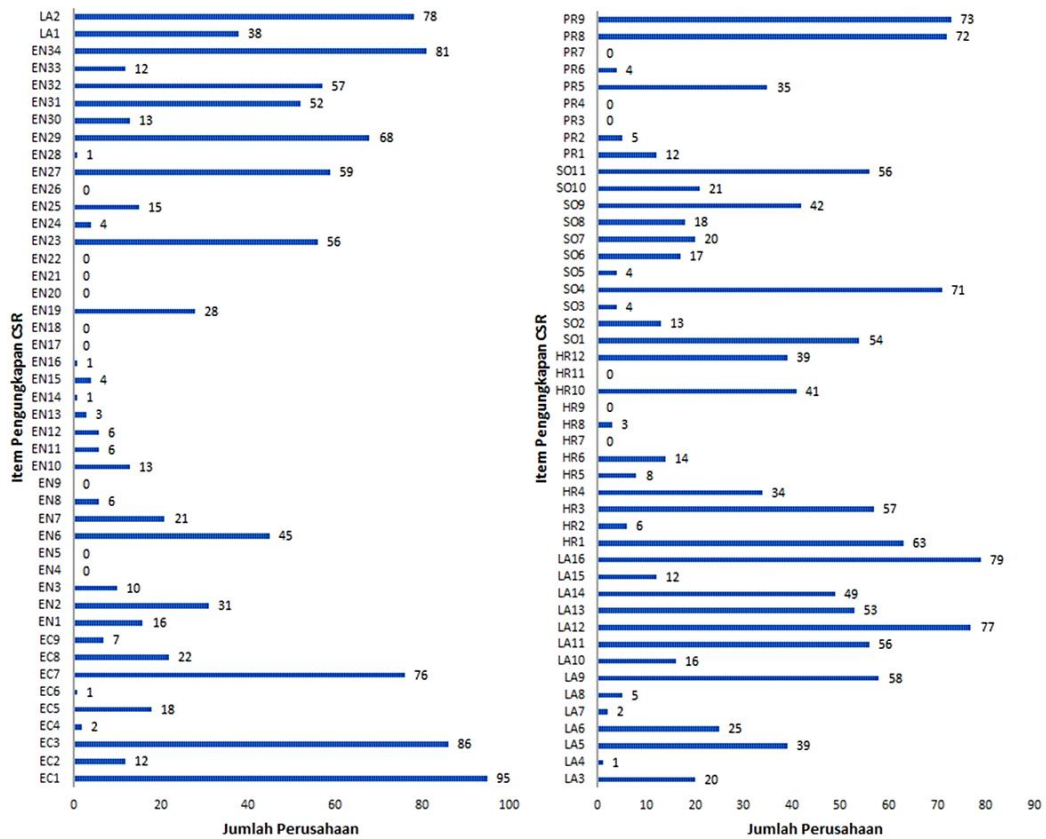
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KI	96	1,100	98,010	55,379	30,385
KA	96	0,150	97,500	25,492	23,491
CSRDI	96	8,790	47,250	27,151	9,573
Valid N (listwise)	96				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Tabel 2 menunjukkan variabel kepemilikan institusional yang diproksikan dengan KI memiliki sampel memiliki nilai minimum sebesar 1,10 yang berasal dari perusahaan Suryamas Dutamakmur Tbk. tahun 2017, dan nilai maksimum sebesar 98,01 yang berasal dari perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk. tahun 2019. Nilai rata-rata variabel kepemilikan institusional adalah 55,379 dengan standar deviasi sebesar 30,385. Variabel kepemilikan asing yang diproksikan dengan KA memiliki nilai minimum sebesar 0,15 yang berasal dari perusahaan Plaza Indonesia Realty Tbk. tahun 2019, dan nilai maksimum sebesar 97,50 yang berasal dari Suryamas Dutamakmur Tbk. tahun 2017. Nilai rata-rata variabel kepemilikan asing adalah 25,492 dengan standar deviasi sebesar 23,491. Pengungkapan CSR yang diproksikan dengan CSRDI memiliki nilai minimum sebesar 8,79 yang berasal dari Suryamas Dutamakmur Tbk. tahun 2017, dan nilai maksimum sebesar 47,25 yang berasal dari Waskita Karya (Persero) Tbk. tahun 2019. Nilai rata-rata pengungkapan CSR adalah 27,151 dengan standar deviasi sebesar 9,573. Nilai standar deviasi yang lebih tinggi dibanding nilai rata-rata membuktikan adanya variasi yang besar antara nilai maksimum dan minimum, sedangkan nilai standar deviasi yang lebih rendah dibanding nilai rata-rata membuktikan adanya variasi yang rendah.

Frekuensi pengungkapan CSR pada perusahaan properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019 berdasarkan *item-item* pengungkapan GRI G4 disajikan secara grafis pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Frekuensi Pengungkapan CSR Perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi Bangunan di BEI Periode 2017-2019 berdasarkan Pedoman GRI G4

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Gambar 2, *item* pengungkapan CSR yang paling banyak diungkapkan adalah nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan (EC1) yang merupakan salah satu *item* pada kategori ekonomi, dimana *item* EC1 diungkapkan pada 95 amatan. *Item* yang tidak diungkapkan adalah sejumlah 15. Pada kategori lingkungan terdapat 9 *item* yang tidak diungkapkan, yaitu EN4, EN5, EN9, EN17, EN18, EN20, EN21, EN22, dan EN26, sedangkan pada kategori sosial terdapat 6 *item* yang tidak diungkapkan, yaitu HR7, HR9, HR11, PR3, PR4, dan PR7.

Uji asumsi klasik penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan hasil uji normalitas yang disajikan pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,282 lebih besar dari 0,05 ($\text{sig.} = 0,282 > 0,05$) menunjukkan data variabel yang digunakan dalam penelitian sudah berdistribusi secara normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4, dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* variabel bebas, yaitu Kepemilikan Institusional (KI) dan Kepemilikan Asing (KA) masing-masing lebih besar daripada 0,10 (*tolerance* = 0,758; $0,758 > 0,10$) dengan nilai VIF kurang dari 10 (VIF = 1,319; $1,319 < 10$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel dalam model regresi.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas	Uji Autokorelasi
	Sig. (2- tailed) Kolmogorov Smirnov Z	Tolerance	VIF	Durbin-Watson	Sig.
KI	0,282	0,758	1,319	1,839	0,551
KA		0,758	1,319		0,924

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel kepemilikan institusional sebesar 0,551 dan nilai signifikansi variabel kepemilikan asing sebesar 0,924. Nilai signifikansi kedua variabel bebas tersebut berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4. dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,839 dengan jumlah sampel sebanyak 96 dan variabel independen sebanyak 2 ($k=2$), maka nilai $dL = 1,6254$ dan $dU = 1,7103$ sehingga diperoleh nilai $4-dU = X$. Jadi, dapat dirumuskan kriteria $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,6254 < 1,839 < 2,2897$, hal tersebut menunjukkan bahwa data pada model regresi yang digunakan telah terbebas dari gejala autokorelasi.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing pada variabel terikat, yaitu pengungkapan CSR pada perusahaan jasa sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI Periode 2017-2019. Adapun hasil dari pengujian regresi linier berganda pada penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,550	0,170		14,980	0,000
KI	0,232	0,033	0,585	7,023	0,000
KA	-0,066	0,026	-0,214	-2,567	0,012

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 5, dapat disimpulkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,500 memiliki arti bahwa 50 persen variasi (naik-turunnya) variabel pengungkapan *corporate social responsibility* (CSRDI) dipengaruhi secara bersama-sama oleh variasi dari kedua variabel bebas, yaitu kepemilikan institusional (X1) dan kepemilikan asing (X2), sedangkan sisanya sebesar 50 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,232 dengan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,000 yang lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hipotesis pertama (H_1) penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR diterima. Hasil penelitian ini dapat mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Shahab & Ye, 2018), Edison (2017), Nurleni *et al.* (2018),

Singal & Putra (2019), Suhartono *et al.* (2018), Visessa & Efendi (2019), serta Yani & Suputra (2020). Hasil penelitian ini dapat membuktikan teori keagenan, dimana kepemilikan institusional sebagai organ tata kelola perusahaan dapat melakukan fungsi pengawasannya untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Pemegang saham institusional dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan CSR sebagai bentuk transparansi perusahaan sehingga asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham dapat dikurangi. Pemegang saham institusional sebagai alat *monitoring* perusahaan dapat memastikan bahwa struktur tata kelola telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dengan baik dengan melakukan pengungkapan CSR sebagai salah satu penerapan prinsip transparansi.

Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi pada variabel kepemilikan asing adalah sebesar -0,066 dengan tingkat signifikansi uji t sebesar 0,012 yang lebih kecil dibandingkan dengan taraf nyata $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif pada pengungkapan CSR. Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif pada pengungkapan CSR ditolak. Pernyataan bahwa pemegang saham asing lebih memiliki kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan belum mampu memberi jaminan bahwa kepemilikan asing yang besar dapat meningkatkan pengungkapan CSR. Pada penelitian ini pengungkapan CSR pada kategori lingkungan masih relatif rendah dibandingkan dengan pengungkapan pada kategori ekonomi. Suryamas Dutamakmur Tbk. sebagai perusahaan dengan persentase kepemilikan asing terbesar dalam penelitian ini juga memiliki indeks pengungkapan CSR terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing pada penelitian tidak mementingkan aspek lingkungan melainkan cenderung mementingkan aspek ekonomi seperti laba perusahaan. Penelitian ini tidak dapat mendukung penelitian Harvidiyan & Dianawati (2020), Naqvi (2019), Nurhandika & Hamzah (2019), Putri & Gunawan (2019), Rustam *et al.* (2019), serta Yani & Suputra (2020) yang menemukan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan CSR. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan teori keagenan, dimana pemegang saham dengan fungsi pengawasannya mampu mengurangi konflik kepentingan akibat asimetri informasi perusahaan. Pemegang saham asing dalam penelitian ini tidak dapat memastikan bahwa struktur tata kelola perusahaan telah melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Garaika & Margahana (2019) dan Ristiyana (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari kepemilikan asing pada pengungkapan CSR.

SIMPULAN

Kepemilikan institusional berpengaruh positif pada pengungkapan CSR. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengungkapan CSR di perusahaan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Kepemilikan asing berpengaruh negatif pada pengungkapan. Pengaruh negatif ini bermakna bahwa semakin besar tingkat kepemilikan asing maka semakin kecil

tingkat pengungkapan CSR di perusahaan sektor properti, *real estate*, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di BEI periode 2017-2019.

Peneliti menyarankan kepada perusahaan sebaiknya perusahaan dapat mengungkapkan informasi CSR dalam bentuk laporan keberlanjutan perusahaan setiap tahunnya sesuai standar yang berlaku sehingga pemangku kepentingan lebih mudah meninjau kegiatan CSR. Bagi investor, sebelum melakukan penanaman modal pada suatu perusahaan sebaiknya menilai tata kelola perusahaan seperti pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR dapat menjadi tolak ukur keberlangsungan perusahaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi pada perusahaan. Pentingnya pemerintah mengatur regulasi dan memfasilitasi pelaksanaan CSR bagi perusahaan berupa fasilitasi perijinan pelaksanaan CSR, sosialisasi tentang CSR kepada masyarakat, dan berbagi program dengan perusahaan untuk memaksimalkan kegiatan CSR. Penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel bebas, yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. Pada penelitian ini, variabel kepemilikan asing berpengaruh negatif pada pengungkapan CSR. Kemungkinan masih terdapat variabel-variabel kepemilikan lain yang dapat memengaruhi pengungkapan CSR, oleh sebab itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel kepemilikan lainnya, seperti kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, atau kepemilikan publik dalam penelitian. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu standar yang dikeluarkan oleh *Global Sustainability Standards Board* (GSSB) pada tahun 2016.

REFERENSI

- Aldin, I. U. (2020). *BEI: Tahun Ini Awal Kebangkitan Investor Retail di Pasar Modal*. Diakses pada 28 Desember Tahun 2020, dari <https://katadata.co.id/safrezifitra/finansial/5fc64398c3124/bei-tahun-ini-awal-kebangkitan-investor-retail-di-pasar-modal>.
- Anonim. (2018). *K3 Harus Diimplementasikan pada Seluruh Proyek Konstruksi*. Diakses pada 6 November Tahun 2020, dari <https://binakonstruksi.pu.go.id/informasi-terkini/sekretariat-direktorat-jenderal/k3-harus-diimplementasikan-pada-seluruh-proyek-konstruksi/>
- Anonim. (2020). *Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan, Pemenuhan Target RPJMN dan Renstra*. Diakses pada 6 November Tahun 2020, dari <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/pembangunan-infrastruktur-untuk-mengejar-ketertinggalan-pemenuhan-target-rpmjn-dan-renstra>
- Bardan, A. B. (2020). *Ini Alasan Jokowi Tetap Garap Proyek Infrastruktur di Tengah Pandemi Corona*. Diakses pada 6 November Tahun 2020, dari <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-jokowi-tetap-garap-proyek-infrastruktur-di-tengah-pandemi-corona>
- Cadbury Committee. (1992). *Report of The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee.
- Chariri, A., & Ghozali, I. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Crystalita, & Juniarti. (2017). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Corporate Social

- Responsibility terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Barang Konsumsi di Indonesia dengan Variabel Kontrol Firm Size dan Analyst Following. *Business Accounting Review*, 5(1), 181-192.
- Edison, A. (2017). Struktur Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Pengaruhnya terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2014). *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(2), 164-175. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6311>
- Farooque, O. Al, van Zijl, T., Dunstan, K., & Karim, A. W. (2007). Ownership Structure and Corporate Performance: Evidence from Bangladesh. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 14(2), 127-149. <https://doi.org/10.1080/16081625.2007.9720792>
- FCGI. (2001). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) (Edisi 2, Jilid 2)*. FCGI.
- Fitranita, V., Kamaludin, & Midiastuty, P. P. (2017). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Fairness*, 7(1), 57-68.
- Fitriana, R. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 8(2), 1-18. <https://doi.org/10.34010/jika.v8i2.1652>
- Garaika, & Margahana, H. (2019). The Effect Composition of Board and Ownership Structure on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Concentrated Ownership Companies. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 35(22), 2899-2921.
- Gavana, G., Gottardo, P., & Maria Moisello, A. (2017). The Effect of Equity and Bond Issues on Sustainability Disclosure. Family vs Non-family Italian Firms. *Social Responsibility Journal*, 13(1), 126-142. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0066>
- Harvidiyan, I., & Dianawati, W. (2020). The Effect of Share Ownership Structure, Board of Commissioner Size, and Audit Committee Size on Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 574-591.
- Hermawan, A., & Gunardi, A. (2019). Motivation for Disclosure of Corporate Social Responsibility: Evidence from Banking Industry in Indonesia. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 6(3), 1297-1306. [https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3\(17\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.3(17))
- Hitipeuw, S. D., Kuntari, Y., & Triani. (2020). Pengaruh Kepemilikan Saham Publik, Profitabilitas, dan Media terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 40-51.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Malik, H. A., Ahsan, S. M., & Khan, J. S. (2017). Impact of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Evidence from Pakistan. *International*

- Journal of Scientific & Engineering Research*, 8(1), 1938–1952.
- Manurung, E., & Muid, D. (2015). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(2), 147–155.
- Naqvi, S. M. R. H. (2019). *Ownership Structure and Corporate Social Responsibility : A Comparative Analysis of Pakistani and Malaysian Non-Financial Firms*. Tesis. Capital University of Science and Technology, Islamabad.
- Nurhandika, A., & Hamzah, A. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Dampaknya pada Nilai Perusahaan. *Sosio E-Kons*, 11(3), 249–258. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v11i3.5084>
- Nurleni, N., Bandang, A., Darmawati, & Amiruddin, A. (2018). The Effect of Managerial and Institutional Ownership on Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Law and Management*, 60(4), 979–987. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0078>
- Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2004). *The OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Putri, E. I., & Gunawan, B. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, dan Struktur Kepemilikan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016). *Seminar Nasional dan The 6th Call For Syariah Paper (SANCALL)*.
- Ristiyana, R. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis XXVI*, 1(3), 25–45.
- Rustam, A., Wang, Y., & Zameer, H. (2019). Does Foreign Ownership Affect Corporate Sustainability Disclosure in Pakistan? A Sequential Mixed Methods Approach. *Environmental Science and Pollution Research*, 26(30), 31178–31197.
- Sajekti, E. M., & Priyadi, M. P. (2019). Pengaruh Faktor Fundamental dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–20.
- Santoso, S. (2016). Konsep Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Konvensional dan Fiqh Sosial. *AHKAM*, 4(1), 81–104.
- Sartono, A. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi (Edisi 4)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Sayekti, Y., & Wondabio, L. S. (2007). Pengaruh CSR Disclosure terhadap Earning Response Coefficient. *Symposium Nasional Akuntansi X*.
- Shahab, Y., & Ye, C. (2018). Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance: Empirical Insights on Neo-Institutional Framework from China. *International Journal of Disclosure and Governance*, 15(2), 87–103. <https://doi.org/10.1057/s41310-018-0038-y>
- Singal, P. A., & Putra, I. N. W. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Asing pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(1), 468–484. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i01.p30>

- Suhartono, Mawarni. S., I., & Wahyuni, S. (2018). IFRS Convergence Investigation: Corporate Social Responsibility Disclosure in Relation to Good Corporate Governance and Corporate Size. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 4(2), 531-546. <https://doi.org/10.20319/pijss.2018.42.531546>
- Sulistyo, R., & Hermanto, S. B. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(9), 1-25.
- Ulya, F. N. (2019). 2020, Anggaran Infrastruktur Naik 4,9 Persen jadi Rp 419,2 Triliun. Diakses pada 5 Mei Tahun 2020, dari <https://money.kompas.com/read/2019/08/17/100600926/2020-anggaran-infrastruktur-naik-4-9-persen-jadi-rp-419-2-triliun>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Diakses pada 8 November Tahun 2020, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2007/25TAHUN2007UU.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Diakses pada 8 November Tahun 2020, dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2007/pp40-2007.pdf>
- Visesha, N., & Efendi, D. (2019). Pengaruh Kepemilikan Saham terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(3), 1-21.
- Won-Yong, O., Jongseok, C., & Kyun, C. Y. (2015). Does Ownership Structure Matter? The Effects of Insider and Institutional Ownership on Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 146(1), 111-124. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2914-8>
- Yani, N. P. T. P., & Suputra, I. D. G. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1196-1207. <https://doi.org/10.24843/EJA.2020.v30.i05.p10>
- Yurdila J, M., Mukhzarudfa, H., & Wiralestari. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris, Leverage dan Pengungkapan Media terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan yang Go Public dan Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(4), 11-25. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i4.84>
- Zulaecha, H. E., & Murtanto. (2019). Foreign Ownership and Sustainability Performance in Indonesia. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 1(1), 1-12. <https://doi.org/10.35912/ijfam.v1i1.39>